

BOARD of PEACE



DONALD J. TRUMP INSTITUTE OF PEACE



BOARD of PEACE



BOARD OF ~~WAR~~ PEACE & MANUVER BEBAS AKTIF PRESIDEN PRABOWO

ARAH BARU ATAU SALAH ARAH?



**Telaah
Kebijakan**

 mudabicara.id

  [@mudabicaraid](https://www.tiktok.com/@mudabicaraid)

 [Muda Bicara ID](https://www.youtube.com/MudaBicaraID)



Board of Peace dan Manuver Bebas Aktif Presiden Prabowo: Arah Baru atau Salah Arah?

Penanggungjawab:

- Moch Edward Trias Pahlevi

Peneliti:

- Muhammad Iqbal Khatami
- Raihan Aditya Ramadhan
- Agi

Penyuntingan dan Tata Letak: Muda Bicara ID

www.mudabicara.id

Dipublikasikan Maret 2026

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Halaman Judul _____	i
Halaman Judul Dalam _____	ii
Daftar Isi _____	iii
Ringkasan Eksekutif _____	1
Pendahuluan _____	2
Anatomi Board of Peace: Struktur, Legitimasi, dan Problematika _____	3
Alat Perdamaian atau Sekadar Alat Kekuasaan Transaksional AS? _____	3
Dilema Prinsip Bebas Aktif _____	5
Respon Bertahan di Tekanan Ekonomi? _____	7
Kontroversi Keanggotaan Israel, Pengiriman Pasukan, hingga Israel yang Bebas Iuran _____	8
Rekomendasi Kebijakan _____	11
Kesimpulan _____	12
Referensi _____	13

BOARD of PEACE



RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP), inisiatif Donald Trump di WEF Davos 2026 untuk menangani Gaza, menimbulkan pro-kontra antara “arah baru” dan “salah arah” dalam politik luar negeri Indonesia. Secara formal, keterlibatan ini dibenarkan sebagai upaya melindungi kepentingan Palestina dan mewujudkan perdamaian berkeadilan, sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip bebas aktif.

Namun, struktur BoP yang menghadirkan Israel sebagai anggota utama sementara Palestina hanya diwakili komite teknokratik menimbulkan kekhawatiran atas ketimpangan dan dominasi AS. Kehadiran Israel di bawah payung inisiatif yang mengklaim sebagai “perdamaian” diperparah oleh kelanjutan serangan dan keputusan Israel untuk tidak membayar iuran rekonstruksi, sementara Indonesia dan sejumlah negara lain diminta berkontribusi besar.

Di sisi domestik, keputusan ini juga berbenturan dengan kebutuhan fiskal, karena iuran sekitar 1 miliar USD ($\pm$ Rp16,7 triliun) diusulkan berasal dari APBN, padahal defisit dan tekanan anggaran sudah tinggi. Kritik dari parlemen, lembaga penelitian, dan LSM hak asasi menilai langkah ini lebih merupakan respons pragmatis terhadap tekanan ekonomi AS ketimbang pilihan berbasis prinsip.

Rekomendasi

- Perkuat transparansi anggaran BoP, termasuk rincian pos dari APBN, mekanisme pencairan, dan KPI yang dipertanggungjawabkan ke publik
- Pastikan Indonesia hadir sebagai aktor substantif dalam BoP yang menegaskan keadilan dan kemerdekaan Palestina, bukan sekadar pelengkap forum.
- Perkuat koordinasi dengan negara Muslim lain untuk menjadikan BoP sebagai ruang diplomasi nyata bagi Palestina.
- Tetapkan parameter dan trigger point penarikan diri Indonesia jika BoP terbukti memperkuat ketidaksetaraan, mempertahankan impunitas Israel, atau mengabaikan aspirasi politik rakyat Palestina.
- Tetapkan Rules of Engagement (ROE) independen bagi TNI yang tidak terikat komando AS-Israel.
- Tegaskan secara tertulis bahwa TNI tidak akan dilibatkan dalam pelucutan senjata faksi pejuang Palestina atau dalam operasi yang mengamankan kebijakan rezim pendudukan.

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung sejak 1948 dan melibatkan berbagai perang besar di kawasan Timur Tengah, menjadikannya salah satu konflik berkepanjangan paling kompleks dalam tatanan internasional modern. Setiap inisiatif perdamaian yang hadir perlu diuji secara historis dan normatif, termasuk Board of Peace (BoP) yang diperkenalkan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari 2026. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif, memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab moral dalam setiap upaya penyelesaian konflik tersebut

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mengamanatkan bahwa Indonesia "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Prinsip ini dioperasionalisasikan melalui UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menuntut kebijakan independen, kreatif, serta berorientasi pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, setiap keputusan bergabung dengan organisasi internasional baru, khususnya yang belum teruji legitimasi dan efektivitasnya harus diuji kesesuaiannya dengan mandat konstitusional tersebut.

Keanggotaan Indonesia dalam BoP menuai protes dari berbagai kalangan. banyak pihak menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan posisi moral dan konstitusional bangsa (Tempo, 2026). Terlebih, status Indonesia hanya sebagai anggota biasa, sementara keikutsertaan Israel dalam forum yang sama juga menjadi sorotan tersendiri. Di sisi lain, rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza melalui International Stabilization Force (ISF) turut memicu kontroversi. Selain menyerap anggaran besar yang berpotensi menggeser prioritas domestik, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanudin menilai operasi ini berisiko tinggi karena TNI akan berhadapan langsung dengan eskalasi konflik yang intensif (IDN Times, 2026).

Kajian kebijakan ini hadir untuk memberikan analisis kritis-komprehensif terhadap keputusan Indonesia bergabung dengan BoP, dengan menimbang aspek kelembagaan, geopolitik, fiskal, serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.



ANATOMI BOARD OF PEACE: STRUKTUR, LEGITIMASI, DAN PROBLEMATIKA

Board of Peace sendiri merupakan suatu organisasi yang diinisiasi oleh Donald Trump dalam misi perdamaian di Gaza. Menurut Hadza min Fadly Robby, Associate Professor Departement International Relations Ull menjelaskan bahwa organisasi ini merupakan turunan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2803 untuk stabilisasi Gaza (The Conversation, 2026).

Dikutip dari beberapa sumber pemberitaan, rencana komprehensif BoP dirancang sebagai transitional administration dengan mandat luas, mulai dari rekonstruksi infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga menjaga stabilitas keamanan di Gaza. Struktur operasionalnya mencakup **empat klaster utama:**

(1) gencatan senjata dan kemanusiaan; (2) keamanan dan militer melalui International Stabilization Force (ISF); (3) pembentukan pemerintahan transisi Gaza; serta (4) pembangunan masa depan Gaza melalui zona ekonomi khusus.

1. ALAT PERDAMAIAN ATAU SEKADAR ALAT KEKUASAAN TRANSAKSIONAL AS?

BoP menghadapi kritik tajam karena strukturnya yang kontradiktif: menghadirkan Israel sebagai perwakilan, namun mengecualikan Palestina dari pengambilan keputusan utama. Ketimpangan ini memunculkan kekhawatiran akan "perdamaian semu" yang hanya menguntungkan pihak kuat tanpa melibatkan aspirasi korban secara setara. Absennya komitmen terhadap kemerdekaan Palestina mendorong Brasil dan Meksiko menolak bergabung, dengan alasan BoP tidak memiliki dasar keadilan yang kuat (Laksmiana, 2026).

Melalui struktur ini, Washington berupaya menciptakan jalur unilateral untuk mengontrol resolusi konflik tanpa hambatan veto Rusia atau Tiongkok. BoP pun dinilai sebagai manifestasi upaya negara adidaya memanipulasi institusi internasional demi kepentingan keamanannya sendiri (The Guardian, 2026).



Parameter Analisis Inti	Kerangka Multilateral Tradisional (PBB)	<i>Board of Peace</i>
Pusat Pengambilan Keputusan	Dewan Keamanan (DK PBB) dan resolusi Majelis Umum.	<i>Donald J. Trump Institute of Peace</i> ; hak veto de facto di tangan Trump.
Basis Legitimasi & Otoritas Hukum	Hukum Internasional, Konvensi Jenewa, dan Piagam PBB.	Paksaan diplomatik hegemonik AS, koersi ekonomi, dan kesepakatan transaksional eksklusif.
Persyaratan Keanggotaan & Partisipasi	Terbuka bagi negara berdaulat; voting setara.	Berbasis undangan AS; kursi tetap mensyaratkan kontribusi USD 1 miliar.
Aktor Keamanan Utama di Lapangan	Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (<i>Blue Helmets</i>) dengan mandat netral.	<i>International Stabilization Force (ISF)</i> di bawah Komando Militer AS (Mayor Jenderal Jasper Jeffers).
Posisi dan Status Kedaulatan Palestina	Pengamat non-anggota PBB; aktif memperjuangkan keanggotaan penuh.	Diwakili komite teknokratik (NCAG) tanpa hak suara atau keanggotaan utama.

Krisis legitimasi BoP semakin nyata dengan penolakan dari sekutu tradisional AS dan institusi moral global. Uni Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman menolak bergabung karena mandat politik yang kabur dan struktur pendanaan yang tidak transparan, seraya menegaskan bahwa penyelesaian krisis global harus tetap di bawah naungan PBB. Penolakan juga datang dari Vatikan, Paus Leo XIV dan Kardinal Pietro Parolin memandang BoP sebagai upaya memindahkan otoritas resolusi konflik ke tangan AS demi kepentingan domestik presidennya.





2. Dilema Prinsip Bebas Aktif

Pemerintah mengklaim keikutsertaan dalam BoP sebagai "Arah Baru" yang pragmatis untuk menavigasi tatanan global. Namun, terdapat indikasi kuat bahwa ini justru "Salah Arah."

“

Prinsip bebas aktif yang bermakna kemandirian tanpa memihak blok mana pun kini tereduksi menjadi sekadar free maneuver yang bernuansa pragmatisme transaksional demi keuntungan ekonomi jangka pendek

(Shidore, 2024)

Transisi ini didorong secara kuat oleh tuntutan internal pemerintahan Prabowo Subianto. Di dalam negeri, presiden memiliki ambisi raksasa: mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan melakukan modernisasi kekuatan militer secara besar-besaran. Untuk merealisasikan mimpi yang membutuhkan dana super besar ini, Indonesia sadar bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri dan terpaksa harus "berteman" dengan aktor-aktor kekuatan utama dunia, termasuk Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, bergabungnya Indonesia ke BoP lebih tepat dibaca sebagai "asuransi politik" ketimbang misi perdamaian murni. Indonesia menghadapi koersi halus (subtle coercion) atau tekanan ekonomi tak langsung dari AS yang berupa ancaman tarif hukuman 32% (Liberation Day tariffs) atas produk-produk Indonesia. Ancaman itu berpotensi menghancurkan ekspor nasional sekaligus menggagalkan target pertumbuhan 8%. Bergabung ke BoP menjadi cara Prabowo meredam tekanan tersebut.



3. Respon Bertahan di Tekanan Ekonomi?

Pertemuan Prabowo–Trump di Washington D.C. pada 19 Februari 2026 itu kemudian menghasilkan kesepakatan yang disebut "Era Keemasan Baru" kemitraan strategis Indonesia–AS, dengan fokus pada Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade).

Komponen Arsitektur Kesepakatan	Rincian Spesifikasi Teknis dan Skala Nilai Finansial	Implikasi Geopolitik dan Kedaulatan Nasional
Agreement on Reciprocal Tariffs (ART)	AS memangkas tarif produk manufaktur Indonesia ke maksimal 19% (dari ancaman 32%); Indonesia menghapus tarif produk AS.	Ekspor jangka pendek selamat, namun dengan konsesi politik di meja BoP.
Paket Kesepakatan Komersial Multisektor AS-RI	Total komitmen mencapai USD 33 miliar, mencakup pertanian, energi, teknologi cip, dan kedirgantaraan.	Ketahanan pangan terjamin, tetapi ekonomi Indonesia semakin terikat pada ekosistem industri blok Washington.
Mega-Akuisisi Boeing via Sovereign Fund Danantara	Komitmen pembelian 50 unit Boeing senilai USD 13,5 miliar ($\pm$ Rp227,91 triliun), dikelola Danantara.	Eksplorasi instrumen kapitalisme negara demi diplomasi elit menjadikan kekayaan publik sebagai pelumas lobi internasional.
Pengeboran Energi, Mineral Kritis, dan Semikonduktor	Joint venture eksplorasi pemulihan sumur ladang minyak (oil field recovery) dan pasokan manufaktur cip semikonduktor masa depan.	Upaya proaktif hedging untuk menyeimbangkan dominasi absolut suplai Tiongkok dalam industri hilirisasi nikel dan baterai.

Pada akhirnya, kita melihat bahwa apa yang diklaim sebagai arah baru diplomasi perdamaian nyatanya adalah manuver pertukaran komersial kelas berat. Kedaulatan kebijakan luar negeri Indonesia, yang seharusnya menjadi pedoman prinsipil berbangsa, kini direduksi menjadi sekadar alat barter, sebuah respons untuk bertahan dari tekanan kekuatan ekonomi asing, dan bukan lagi perwujudan sejati dari bangsa yang merdeka dan berdaulat.



5. Kontroversi Keanggotaan Israel, Pengiriman Pasukan, hingga Israel yang Bebas Iuran

Paradoks Kehadiran Israel

Keanggotaan Israel dalam BoP merupakan salah satu titik kontroversial paling mendasar. Israel yang oleh Mahkamah Internasional telah dinyatakan melakukan pendudukan ilegal atas wilayah Palestina justru ditempatkan sebagai anggota setara dalam forum yang mengklaim memperjuangkan perdamaian.

Ironi ini diperparah oleh fakta bahwa sejak gencatan senjata Oktober 2025, serangan Israel tidak berhenti; serangan 16 Februari 2026 menewaskan 11 warga Palestina dan melukai tiga lainnya.

Amnesty International Indonesia menyebut keikutsertaan Indonesia sebagai langkah "membebek" pada inisiatif Trump, yang kemudian menilai BoP lebih menekan korban (Palestina) ketimbang menghentikan agresor (Israel).



Kontroversi Pembebasan Iuran BoP untuk Israel

Keputusan terbaru Israel untuk tetap bergabung dalam Board of Peace tanpa membayar iuran rekonstruksi semakin menegaskan ketimpangan struktural dalam tata kelola lembaga tersebut.

Wakil Wakil Menteri Keuangan Israel Ze'ev Elkin menyatakan Israel tidak akan berkontribusi untuk rekonstruksi Gaza, dengan alasan negaranya adalah pihak yang "diserang". AS menyetujui pengecualian ini, sementara Qatar dan UEA masing-masing menyeter lebih dari USD 1 miliar. Standar ganda ini memperkuat kesan bahwa BoP lebih berfungsi melindungi kepentingan sekutu AS daripada menjadi mekanisme multilateral yang adil bagi korban utama yakni rakyat Palestina.



Risiko Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza

Indonesia berencana mengirimkan 8.000 hingga 20.000 personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari ISF. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran serius dari berbagai pihak:



Pengiriman TNI berisiko tinggi karena personel akan berada dalam zona konflik intensitas tinggi



Pusat komando ISF berada di Israel di bawah pimpinan AS (Mayjen Jasper Jeffers), berpotensi menjadikan TNI sebagai instrumen legitimasi agenda asing



Faksi-faksi Gaza menolak kehadiran pasukan asing di dalam wilayah; mereka menghendaki penempatan di perbatasan sebagai pencegah serangan Israel.



UU TNI mewajibkan persetujuan DPR untuk penggunaan kekuatan militer di luar negeri, mekanisme yang hingga kini belum ditempuh.





6. Beban Fiskal: Implikasi terhadap APBN dan Prioritas Domestik

Mekanisme Kontribusi Keuangan

Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) membawa konsekuensi diplomatik sekaligus implikasi finansial bagi stabilitas fiskal nasional. BoP menetapkan standar kontribusi yang membedakan posisi tawar antarnegara. Untuk menjadi anggota tetap (permanent member) dengan hak suara dalam keputusan rekonstruksi jangka panjang, setiap negara wajib menyumbang USD 1 miliar (sekitar Rp16,7 - Rp17 triliun).

Meski sering disebut iuran sukarela, terdapat perbedaan mendasar pada durasi mandatnya. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa negara yang tidak membayar tetap dapat bergabung, namun masa keanggotaannya terbatas tiga tahun. Sebaliknya, iuran penuh menjamin posisi permanen Indonesia (CNN Indonesia, 2025). Status ini dianggap strategis agar Indonesia menjadi pemain kunci yang mengawal langsung penyaluran bantuan untuk rakyat Palestina, bukan sekadar penonton.

Namun, sumber pendanaan iuran ini memicu perdebatan hangat di ruang publik. Menteri Keuangan mengonfirmasi bahwa kontribusi Rp16,7 triliun tersebut bersumber dari APBN melalui pos anggaran Kementerian Pertahanan (CNN Indonesia, 2026). Jika dibandingkan dengan total APBN Indonesia tahun 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun, nilai iuran ini mencakup sekitar 0,43% dari total belanja negara.





Jika dibandingkan dengan total pagu belanja APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, nilai iuran BoP mencakup sekitar 0,43% dari total belanja negara. Meskipun tampak kecil secara persentase, angka Rp16,7 triliun memiliki makna fiskal yang signifikan jika dikontekstualisasikan:

Pembanding	Nilai	Rasio terhadap iuran BoP
iuran BoP	Rp16,7 triliun	1,0x
Realisasi bantuan sosial Januari 2026	Rp9,5 triliun	0,57x
APBN sudah defisit Rp54,6 triliun per Januari 2026	Rp54,6 triliun	3,3x
Tambahan alokasi bencana Sumatera	Rp10,65 triliun	0,64x

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Data menunjukkan bahwa APBN 2026 per Januari sudah mencatatkan defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21% terhadap PDB. Dalam kondisi fiskal yang sudah tertekan, alokasi tambahan Rp16,7 triliun untuk BoP berpotensi memperburuk tekanan anggaran dan mengurangi ruang fiskal bagi prioritas domestik seperti penanganan bencana, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur.



Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah efektivitas BoP dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza sudah cukup teruji untuk menjustifikasi pengeluaran sebesar itu dari uang rakyat? Hingga saat ini, jawaban atas pertanyaan tersebut belum tersedia secara meyakinkan

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penguatan Mekanisme Pengawasan Domestik

- Keanggotaan Indonesia dalam BoP beserta konsekuensi finansial dan militernya wajib mendapat persetujuan formal DPR melalui mekanisme ratifikasi konstitusional sesuai UU Perjanjian Internasional.
- Pemerintah perlu membentuk tim pakar khusus untuk memastikan setiap langkah Indonesia dalam BoP konsisten dengan prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional.
- Rincian pos anggaran, mekanisme pencairan, dan indikator keberhasilan (KPI) dari kontribusi Rp16,7 triliun harus dibuka secara transparan kepada publik

2. Penjagaan Prinsip Politik Luar Negeri

- Indonesia harus hadir secara substantif, bukan simbolik dengan agenda jelas: keadilan, keamanan, dan persatuan Palestina.
- Indonesia perlu memperkuat koordinasi dengan Turki, Qatar, Yordania, dan negara Muslim lainnya agar BoP menjadi ruang diplomasi nyata, bukan forum seremonial.
- Parameter dan trigger point penarikan diri dari BoP perlu dirumuskan secara formal apabila organisasi ini terbukti melanggar ketidakadilan terhadap Palestina.

3. Perlindungan Personel Militer

- Sebelum pengiriman pasukan, pemerintah wajib menetapkan ROE (Rules of Engagement) yang jelas dan independen dari rantai komando AS-Israel.
- Pengiriman pasukan ke luar negeri wajib mendapat persetujuan DPR sesuai UU TNI.
- Pemerintah harus memastikan secara tertulis bahwa TNI tidak dilibatkan dalam operasi pelucutan senjata faksi pejuang Palestina..

4. Evaluasi Efektivitas Berkala

- Efektivitas partisipasi Indonesia diukur melalui indikator berbasis Foreign Policy Analysis dan Role Theory untuk memastikan keterlibatan bukan sekadar simbolik, melainkan instrumen nyata perdamaian.
- Pemerintah melaporkan capaian konkret kepada DPR dan publik secara berkala, mencakup kemajuan perdamaian, perlindungan hak Palestina, dan efisiensi anggaran.



Kesimpulan

Dalam hal kebijakan luar negeri, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace menimbulkan masalah yang rumit. Ada yang mengatakan bahwa dengan berpartisipasi dari dalam, Indonesia dapat bertindak sebagai penyeimbang dan secara langsung mendukung kepentingan Palestina. Sebaliknya, terdapat korelasi kuat antara keputusan untuk bergabung dan tekanan ekonomi AS, yang ditunjukkan oleh ancaman tarif. Oleh karena itu, sangat sulit untuk melepaskan partisipasi Indonesia dari aspek koersi halus (subtle coercion).

Prinsip bebas aktif tidak boleh direduksi menjadi kalkulasi ekonomi jangka pendek. Siswanto dari BRIN menegaskan bahwa prinsip ini menuntut kebijakan luar negeri yang independen dan berpihak pada kepentingan nasional, termasuk komitmen konstitusional menentang kolonialisme dan mendukung kemerdekaan Palestina. Partisipasi Indonesia dalam BoP hanya dapat dibenarkan jika terbukti berkontribusi nyata pada perdamaian yang adil dan terbentuknya negara Palestina yang merdeka tanpa mengorbankan prinsip dasar yang membentuk identitas bangsa.



REFERENSI

- Berikut versi yang sudah dirapikan sesuai APA 7th (online newspaper/magazine & web page):
- Laksmana, E. A. (2026, February 20). Indonesia at the Board of Peace: Realistic choice or subtle coercion? Modern Diplomacy.
- <https://moderndiplomacy.eu/2026/02/20/indonesia-at-the-board-of-peace-realistic-choice-or-subtle-coercion/>
- The Guardian. (2026, February 18). Trump's "Board of Peace" holds first meeting amid international skepticism. The Guardian.
- <https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/18/trump-board-of-peace-first-meeting>
- Varkaris, G. (2024, February 15). Prabowo Subianto: What to expect from Indonesia's next president. Responsible Statecraft.
- <https://responsiblestatecraft.org/prabowo-subianto-indonesia-elections/>
- Faisol, A. (2026, February 16). Anggota DPR: Pengiriman TNI ke Gaza dalam misi BoP berisiko tinggi. IDN Times.
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/anggota-dpr-pengiriman-tni-ke-gaza-dalam-misi-bop-berisiko-tinggi-00-xvwcc-gjc3cm>
- Tempo.co. (2026, January 30). PKS ingatkan Indonesia soal Dewan Perdamaian Gaza. Tempo.co.
- <https://www.tempo.co/politik/pks-ingatkan-indonesia-soal-dewan-perdamaian-gaza-2111291>
- The Conversation Indonesia. (2026, January 23). Indonesia gabung "Board of Peace": Strategi tepat atau hilang arah? The Conversation.
- <https://theconversation.com/indonesia-gabung-board-of-peace-strategi-tepat-atau-hilang-arah-274952>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2026, February 14). BRIN bedah Board of Peace dan implikasinya terhadap tata kelola perdamaian global. BRIN.
- <https://www.brin.go.id/news/126759/brin-bedah-board-of-peace-dan-implikasinya-terhadap-tata-kelola-perdamaian-global>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, February 23). Kinerja APBN Januari 2026 solid, pendapatan tumbuh 9,5% dan belanja akseleratif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-APBN-Januari-2026-Solid>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal. (2026, February 23). Pendapatan negara tumbuh 9,5%, APBN tetap solid di awal 2026. Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2026/02/23/4588-pendapatan-negara-tumbuh-95-apbn-tetap-solid-di-awal-2026>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, February 18). Setujui tambahan TKD Rp10,65 triliun untuk terdampak bencana Sumatera. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Setujui-Tambahan-TKD-Rp10,65-Triliun>
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2026, February 20). YLBHI kritik keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, sebut pelanggaran impunitas. SchoolMedia News.
- <https://news.schoolmedia.id/artikel/1108/ylbhi-kritik-keikutsertaan-indonesia-dalam-board-of-peace-sebut-pelanggaran-impunitas>
- CNN Indonesia. (26, February 3). Purbaya soal APBN Bayari iuran Badan Perdamaian : Rp16 T Aja Ga Masalah. CNN Indonesia.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260203170802-532-1324190/purbaya-soal-apbn-bayari-iuran-board-of-peace-rp16-t-aja-ga-masalah>